



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1964, 2014

KEMENSOS. Peraturan Perundang-undangan.
Identifikasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN SOSIAL YANG TELAH DITERBITKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial dengan menyusun identifikasi peraturan perundang-undangan Kementerian Sosial yang telah diterbitkan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2012 tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan harus disesuaikan dengan kondisi terkini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN SOSIAL YANG TELAH DITERBITKAN.

Pasal 1

- (1) Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang telah diterbitkan merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan keputusan yang bersifat mengatur sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diterbitkan Kementerian Sosial.
- (2) Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Menteri.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2012 tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 721), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18 TAHUN 2014

TENTANG : IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN SOSIAL YANG TELAH DITERBITKAN.

1. UNDANG-UNDANG

NO	UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian	
2	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	
3	Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian	
5	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	
6	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman	
7	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	
8	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat	
9	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	
10	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	
11	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	
12	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	
13	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	
14	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	

NO	UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
15	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	
16	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
17	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
18	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	
19	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
20	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	

2. PERATURAN PEMERINTAH

NO	PERATURAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1966 tentang Peraturan Pemberian Penghargaan dan Jaminan Sosial Kepada para Wakawuri beserta Yatim Piatu Pahlawan yang Ditinggalkan Gugur	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian	
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan	
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang	

NO	PERATURAN PEMERINTAH	KETERANGAN
	Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian	
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah	
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah	
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa	
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia)	
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika	
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial	
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	

NO	PERATURAN PEMERINTAH	KETERANGAN
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah	

3. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN

NO	PERATURAN /KEPUTUSAN PRESIDEN	KETERANGAN
1	Keputusan Presiden Nomor 347 Tahun 1964 tentang Panji Pembangunan Sosial	
2	Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 tentang Permainan Lotre Buntut sebagai Kegiatan Subversi	
3	Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1973 tentang Penertiban Perjudian	
4	Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggara Undian	
5	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	
6	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	
7	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata	
8	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan	
9	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS	
10	Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	
11	Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil	
12	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS)	

NO	PERATURAN /KEPUTUSAN PRESIDEN	KETERANGAN
	Bandung	
13	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	
14	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia	
15	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	
16	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	

4. PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI (YANG BERSIFAT MENGATUR)

NO	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	KETERANGAN
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.2-1-29/260 tanggal 21 Januari 1955 tentang Pelaksanaan Mengenai Pengusutan Perbuatan-Perbuatan yang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Dapat Dihukum	
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.1-1-16/1456 tanggal 9 Agustus 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang	
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-11/274 Tahun 1972 tanggal 5 Desember 1972 tentang Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Warakuri serta Yatim/Piatu dari Pahlawan	
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-36/193 Tahun 1973 tanggal 1 Desember 1973 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Pegawai/Pekerja di Lingkungan Departemen Sosial	
5.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk. 3-3-8/239 Tahun 1974 tanggal 2 Nopember 1974 tentang Peraturan Panti Sosial	
6.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-10/243 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Kepada Badan Sosial Swasta	

7.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-53/78 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakuri Serta Yatim Piatu	
8.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/XI/79 Tanggal 1 Nopember 1979 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Balai Penerbitan Braille Indonesia	
9.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/XI/79 Tanggal 1 Nopember 1979 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Panti dan Sasana di Lingkungan Departemen Sosial	
10.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/KEP/XI/79 Tanggal 19 Nopember 1979 tentang Latihan Keahlian Pekerjaan Sosial	
11.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/KEP/XI/79 Tanggal 19 Nopember 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Perlengkapan dan Pemeliharaan Perlengkapan di Lingkungan Departemen Sosial	
12.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tanggal 1 Oktober 1980 tentang Organisasi Sosial	
13.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/KEP/I/1981 tanggal 23 Januari 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna	
14.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tanggal 23 Februari 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat	
15.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/KEP/VIII/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang Panti Rehabilitasi Sosial Penderita Cacat	
16.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 1981 tentang Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Yang Diselenggarakan Oleh Badan Sosial	
17.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar	

18.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/HUK/KEP/III/1982 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh "Prof.Dr.Soeharso" di Surakarta	
19.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Organisasi Sosial	
20.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 Tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan	
21.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/KEP/V/1982 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Rehabilitasi Bekas Penderita Kusta	
22.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 52/HUK/KEP/IX/1982 tentang Badan Musyawarah Nasional Kesejahteraan Sosial	
23.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 64/HUK/KEP/XII/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Di Lingkungan Departemen Sosial	
24.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/KEP/III/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental Di Temanggung	
25.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/KEP/IV/1983 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Sosial	
26.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/KEP/I/1984 tentang Petugas Sosial Kecamatan (PSK)	
27.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/KEP/II/1984 tentang Sumbangan Sosial Melalui STNK	

28.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/HUK/KEP/II/1984 tentang Pengelompokan Unit Kerja, Jalur Penjurangan Jabatan dan Persyaratan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial	
29.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/KEP/II/1984 tentang Ketentuan Pemberian kenaikan Pangkat Pilihan Di Lingkungan Departemen Sosial	
30.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/KEP/II/1984 tentang Persyaratan Pangkat Untuk Jabatan Struktural dan Nota Persetujuan Mutasi Pejabat Eselon III, IV dan V Di Lingkungan Departemen Sosial	
31.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/KEP/II/1984 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial	
32.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/III/1984 tentang Satuan Tugas Sosial	
33.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/KEP/IX/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Dari Luar Negeri oleh Badan-Badan Sosial	
34.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/KEP/XI/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Anak Kurang Mampu Usia 7-12 Tahun Dalam Rangka Wajib Belajar Melalui Orang Tua Asuh	
35.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 34/HUK/KM/VI/1984 tentang Standarisasi Perabot Perkantoran di Lingkungan Departemen Sosial	
36.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1985 tentang Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan di Lingkungan Departemen Sosial	
37.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/1986 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu	

38.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1986 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan Anak Nakal dengan Menggunakan Sarana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Lembang (Bandung), Gemah (Semarang) dan Mataram (Lombok)	
39.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/1986 tentang Program Diploma Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	
40.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/1986 tentang Penggunaan Rumah Jabatan Di Lingkungan Departemen Sosial	
41.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Pembimbing Sosial Masyarakat	
42.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/1987 tentang Singkatan Nama Unit Organisasi, Jabatan dan Kode Disposisi Di Lingkungan Departemen Sosial	
43.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1988 tentang Pembakuan Istilah Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial Dalam Bahasa Inggris	
44.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1988 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna	
45.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1988 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Departemen Sosial	
46.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/1988 tentang Pembentukan Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Departemen Sosial	
47.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial	
48.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1989 tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial	

49.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 6/HUK/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial	
50.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1989 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial	
51.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1989 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Jabatan Pekerja Sosial di Lingkungan Departemen Sosial	
52.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/ 1989 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat Yang Berjasa di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial	
53.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Departemen Sosial	
54.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/1990 tentang Pelatihan Keahlian Pekerja Sosial	
55.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 43/HUK/1990 tentang Satuan Pengamanan di Lingkungan Departemen Sosial	
56.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1991 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan di Lingkungan Departemen Sosial	
57.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Departemen Sosial	
58.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pejabat di Lingkungan Departemen Sosial	
59.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Ahli Pekerja Sosial di Bandung	

60.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Departemen Sosial	
61.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional	
62.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak	
63.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/1992 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika	
64.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1994 tentang Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Sosial Republik Indonesia Di Wilayah Kecamatan	
65.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/1994 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial untuk Dapat Memeperoleh Hak Milik Atas Tanah	
66.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial	
67.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial	
68.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Sosial RI	
69.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana	
70.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1995 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Dalam Panti di Lingkungan Departemen Sosial	
71.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1996 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di Taman Makam Pahlawan	

72.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1996 tentang Penggunaan Rumah Negara Sebagai Mes di Lingkungan Departemen Sosial	
73.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/1996 tentang Prosedur Permohonan Penetapan Sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
74.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial	
75.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pekerja Sosial	
76.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial	
77.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1996 tentang Pekerja Sosial Kecamatan (PSK)	
78.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat	
79.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 68/HUK/1996 tentang Penyelenggaraan Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial	
80.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 9/HUK/1997 tentang Tata Cara Penggunaan Logo Kesetiakawanan Sosial Nasional	
81.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	
82.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak di Luar Panti Sosial	
83.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1997 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Sosial	
84.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial	

85.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1997 tentang Pembinaan Karang Taruna	
86.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1997 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia	
87.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/1997 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Di Lingkungan Direktorat Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial	
88.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Pengangkatan Anak	
89.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 67/HUK/1997 tentang Penambahan Lokasi Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)	
90.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 68/HUK/1997 tentang Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 68/HUK/1997 tentang Penyelenggaraan Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)	
91.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 70/HUK/1997 tentang Penanggulangan HIV/AIDS Bidang Sosial	
92.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/1997 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Departemen Sosial	
93.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 72/HUK/1997 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Departemen Sosial	
94.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar	
95.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1998 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Bantuan Sosial Kepada Wakawuri Atau Yatim Piatu Pahlawan	
96.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 6A/HUK/1998 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Terlantar	
97.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia	

98.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Departemen Sosial	
99.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
100	Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Departemen Sosial	
101	Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof.Dr.Soeharso Surakarta	
102	Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1998 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial	
103	Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1998 tentang Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Pahlawan dan Keluarga Pahlawan	
104	Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Departemen Sosial	
105	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (PRSBG) Kartini Temanggung	
106	Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/1998 tentang Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter	
107	Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	
108	Keputusan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/1998 tentang Pancabutan Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/1998 tentang Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter	

109	Keputusan Menteri Sosial Nomor 43/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Depsos	
110	Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penetapan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia	
111	Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/1998 tentang Pemakaman Jenazah Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dengan Upacara Resmi	
112	Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing	
113	Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/1998 tentang Pola Penyuluhan Sosial dan Strategi Komunikasi Untuk Penyuluhan Sosial	
114	Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa	
115	Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Sosial	
116	Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Departemen Sosial	
117	Keputusan Menteri Sosial Nomor 85/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP)	
118	Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Asuhan Anak (PSAA)	
119	Keputusan Menteri Sosial Nomor 96/HUK/1998 tentang Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial	

120	Keputusan Menteri Sosial Nomor 97/HUK/1998 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Bahan Pangan Beras Untuk Panti dan Pemukiman Sosial	
121	Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial	
122	Keputusan Menteri Sosial Nomor 04/HUK/1999 tentang Pemberian Izin dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Depsos	
123	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1999 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Kekacauan	
124	Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1999 tentang Pemberian Izin Untuk Menjadi Pengurus Dan Atau Anggota Partai Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Sosial	
125	Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila	
126	Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1999 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS) Departemen Sosial	
127	Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial	
128	Keputusan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/1999 tentang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial	
129	Keputusan Menteri Sosial Nomor 67/HUK/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis	
130	Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/1999 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD) Cibinong	

131	Keputusan Menteri Sosial Nomor 93/HUK/1999 tentang Uraian Tugas Pejabat Fungsional Pekerja Sosial di Lingkungan Panti Sosial	
132	Keputusan Menteri Sosial Nomor 93 A/HUK/1999 tentang Standarisasi Ruangan Kantor ,Alat Perlengkapan Kantor ,Rumah Negara dan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Depsos	
133	Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/1999 tentang Prioritas Aksesibilitas Yang Di Butuhkan Penyandang Cacat	
134	Keputusan Menteri Sosial Nomor 116/HUK/1999 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Depsos	
135	Keputusan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 01/HUK/BKSN/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Sosial Nasional	
136	Keputusan Menteri Sosial Nomor 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	
137	Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/PEGHUK/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial	
138	Keputusan Menteri Sosial Nomor 45/PEGHUK/2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	
139	Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Sosial	
140	Keputusan Menteri Sosial Nomor 87/HUK/2002 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial	
141	Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Sosial	

142	Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Lingkungan Departemen Sosial	
143	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Departemen Sosial	
144	Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2003 tentang Kebijakan dan Program Diklat Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	
145	Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional	
146	Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2003 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial Permanen	
147	Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	
148	Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa di Cibinong	
149	Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "PROF.DR.SOEHARSO" Surakarta	
150	Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" di Temanggung	
151	Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	
152	Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) "Abiyoso"	

153	Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial	
154	Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2003 tentang Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Rentan	
155	Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Departemen Sosial	
156	Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/2003 tentang Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal	
157	Keputusan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2003 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2001-2004	
158	Keputusan Menteri Sosial Nomor 87/HUK/2003 tentang Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial	
159	Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial	
160	Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah	
161	Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/2004 tentang Pungutan Biaya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Sosial	
162	Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2004 tentang Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP)	
163	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian	
164	Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Sektor Dan Dunia Usaha	

165	Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sosial RI	
166	Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna	
167	Keputusan Menteri Sosial Nomor 113/HUK/2005 tentang Dana Kesejahteraan Sosial	
168	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian	
169	Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana	
170	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 / HUK / 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial	
171	Peraturan Menteri Sosial Nomor 36 / HUK / 2007 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Sosial	
172	Peraturan Menteri Sosial Nomor 51/ HUK / 2007 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	
173	Peraturan Menteri Sosial Nomor 58 / HUK / 2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial	
174	Peraturan Menteri Sosial Nomor 102 / HUK / 2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center	
175	Peraturan Menteri Sosial Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain	
176	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial	
177	Peraturan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Departemen Sosial	

178	Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	
179	Peraturan Menteri Sosial Nomor 141/HUK/2008 tentang Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2009	
180	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 / HUK / 2009 tentang Pedoman Manajemen Pengelolaan Gudang di Lingkungan Departemen Sosial Tahun 2009	
181	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 / HUK / 2009 tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial	
182	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 / HUK / 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial	
183	Peraturan Menteri Sosial Nomor 56 / HUK / 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	
184	Peraturan Menteri Sosial Nomor 61 / HUK / 2009 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Sosial	
185	Peraturan Menteri Sosial Nomor 84 / HUK / 2009 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2010	
186	Peraturan Menteri Sosial Nomor 106 / HUK / 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial	
187	Peraturan Menteri Sosial Nomor 107 / HUK / 2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial	
188	Peraturan Menteri Sosial Nomor 108 / HUK / 2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial	

189	Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 / HUK / 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak	
190	Peraturan Menteri Sosial Nomor 111 / HUK / 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial	
191	Peraturan Menteri Sosial Nomor 41 / HUK / 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	
192	Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 / HUK / 2010 tentang Penetapan Peraturan Dasar Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia	
193	Peraturan Menteri Sosial Nomor 57 / HUK / 2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera	
194	Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 / HUK / 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna	
195	Peraturan Menteri Sosial Nomor 79 / HUK / 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara	
196	Peraturan Menteri Sosial Nomor 84 / HUK / 2010 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	
197	Peraturan Menteri Sosial Nomor 86 / HUK / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia	
198	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2011 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum Di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	
199	Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	
200	Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/ HUK / 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia	
201	Peraturan Menteri Sosial Nomor 60 /HUK /2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	

202	Peraturan Menteri Sosial Nomor 64 /HUK /2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I Di Lingkungan Kemensos	
203	Peraturan Menteri Sosial Nomor 91/ HUK /2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemensos Republik Indonesia	
204	Peraturan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kemensos Republik Indonesia	
205	Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemensos Republik Indonesia	
206	Peraturan Menteri Sosial Nomor 128/HUK/2011 tentang Kampung Siaga Bencana	
207	Peraturann Menteri Sosial Nomor 176/HUK/2011 tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	
208	Peraturan Menteri Sosial Nomor 182/HUK/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kemensos Republik Indonesia	
209	Peraturan Menteri Sosial Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial	
210	Peraturan Menteri Sosial Nomor 186/HUK/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010 - 2014	
211	Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat	
212	Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera	
213	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	

214	Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	
215	Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	
216	Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	
217	Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial	
218	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	
219	Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan yang Dibiayai dengan BA.999.08 Di Lingkungan Kementerian Sosial	
220	Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Sosial	
221	Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2013 tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	
222	Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	
223	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	
224	Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Sosial	

225	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Kementerian Sosial	
226	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar	
227	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Sosial	
228	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2013 tentang Unit Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Sosial	
229	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Persediaan Di Lingkungan Kementerian Sosial	
230	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	
231	Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial	
232	Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Sosial	
233	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	
234	Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Ke Instansi Sosial Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2014	
235	Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak	

236	Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal	
237	Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna	
238	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	
239	Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial	
240	Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Sosial	
241	Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial	
242	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil	
243	Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana	
244	Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Sosial	
245	Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Sosial	
246	Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Sosial	

247	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial	
248	Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial	
249	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial	
250	Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	
251	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Serah Simpan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam Bidang Kesejahteraan Sosial	
252	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial	
253	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana	
254	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	
255	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri Dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA